

OPINI

TRADISI WACANA KRITIS PEMIKIRAN LOKAL

Oleh: Suhariyadi

Staf Pengajar Unirow Tuban

Meskipun semangat desentralisasi telah mengemuka semenjak tumbangannya kekuasaan Orde Baru, tetapi implementasi semangat tersebut masih berkulat pada persoalan institusi pemerintahan, misalnya bidang birokrasi dan regulasi. Secara psikologis dan kultural, kesadaran untuk benar-benar membangun tata kehidupan dan kebudayaan yang berpijak pada kedaerahan belum terbentuk. Salah satu indikator ke arah itu adalah, belum maksimalnya kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pembangunan daerah. Lebih spesifik lagi jika persoalan itu difokuskan pada partisipasi pemikiran lokal dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Persoalan partisipasi pemikiran lokal di daerah harus dipandang secara dialektis antara pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dan kelompok masyarakat terpelajar sebagai partisipator dan kontributor perumusan kebijakan beserta faktor-faktor pendukungnya. Arah pembahasan dengan mengambil kerangka demikian itu mengarah pada: di mana letak sintesa dari kedua kubu tersebut? Faktor-faktor apakah yang mampu mendorong dan mendukung hal tersebut? Kedua hal itu perlu dicermati untuk dikaji dengan berlandaskan pada suatu asumsi tentang pentingnya keterlibatan semua elemen daerah dalam pembangunan. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Blora sebagai daerah yang memiliki potensi geografis, budaya, dan ekonomi, sudah saatnya membangun tradisi kelokalan dalam setiap kebijakan pembangunannya.

Ada dua asumsi argumentatif yang dapat dipakai sebagai dasar pemikiran tentang pentingnya pemikiran lokal dalam pembangunan daerah, yaitu asumsi historis dan rasional. Dalam konteks sejarah, mau tidak mau harus berpijak pada wilayah yang lebih luas menyangkut sejarah bangsa Indonesia. Dengan mengambil makna sejarah itu, akan dapat menjadi landasan berpikir secara

kedaerahan. Sedang konteks rasional akan mengarah pada berpikir secara metodologis dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan daerah itu.

Sejarah di mana pun mengungkapkan suatu fakta bahwa perubahan suatu bangsa (masyarakat) tidak akan lepas dari sejarah pemikiran yang ada. Semenjak peradaban masih dikuasai cara pandang mitis-metafisis, kelompok terpelajar sudah menanamkan pemikiran-pemikirannya sebagai landasan untuk memahami realitas demi menjalankan kehidupan sehari-hari. Kekuasaan yang paling totaliter sekalipun, tidak luput dari warisan pemikiran para intelektual sebagai landasannya. Sejarah Indonesia modern pun sesungguhnya didorong oleh suatu gerakan kelompok terpelajar dengan semangat nasionalismenya untuk membangun suatu bangsa di awal abad XX. Lahirnya Sumpah Pemuda sebagai tonggak bangkitnya jiwa dan semangat untuk membangun Indonesia, merupakan bukti bahwa kelompok masyarakat ini memiliki peranan penting bagi perubahan.

Marilah kita menyederhanakan sebuah realitas sejarah pentingnya kelompok terpelajar bagi pembangunan bangsa Indonesia modern. Itu dimulai ketika awal abad XX. Tepatnya, pada saat masyarakat Indonesia mulai bersentuhan dengan budaya Barat. Sentuhan tersebut mengakibatkan munculnya kelompok sosial terpelajar, hasil dari pendidikan barat. Dari kelompok sosial inilah timbul semangat dan keinginan untuk berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya Barat yang ditanamkan pada kelompok sosial ini menyadarkan mereka tentang pentingnya nasionalisme. Meskipun orientasi pemikiran mereka berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mereka bersepakat membangun masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa yang modern.

Pemikiran kelompok sosial terpelajar di awal kebangkitan bangsa Indonesia, beraneka ragam orientasinya. Hal itu terlihat pada saat Kongres Pemuda II dan terus berlanjut hingga terjadinya polemik kebudayaan pada masa 30-an. Tidak hanya itu, keanekaragaman pemikiran mereka juga terlihat pada wacana kritis yang dibangun atas karya-karya mereka. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa masa depan masyarakat Indonesia berpijak pada nilai-nilai lokal. Berseberangan dengan pendapat itu, terdapat kelompok yang berorientasi ke barat. Sebagian lagi berpendapat bahwa masa depan masyarakat Indonesia adalah sintesa dari nilai-nilai lokal dan Barat. Tetapi tidak sedikit pula terdapat pemikiran yang berpijak pada nilai-nilai agama.

Hal yang bisa kita tangkap dari keberagaman pendapat itu adalah, tidak terjadinya konflik yang justru mengotori semangat dan harapan mereka untuk membangun suatu bangsa. Fakta sejarah itu merupakan sebuah narasi besar tentang bagaimana bangsa ini mesti dibangun. Perbedaan tersebut menjadi

pendorong berkembangnya suatu wacana kritis kultural masyarakat Indonesia yang modern. Polemik yang terjadi merupakan bagian dari suatu proses perkembangan masyarakat Indonesia kemudian. Itu adalah sebuah pintu keterbukaan yang mesti mereka tegakkan setelah sekian abad mengalami keterbuntutan akibat ideologi lokal dan kolonialisme bangsa lain.

Jika kemudian, masyarakat Indonesia dihadapkan pada sebuah pilihan pada modernisme barat, melalui pintu itulah faham yang mengagungkan rasio, kebebasan, universalitas, dan teknologi tersebut sebagai sebuah ideologi baru yang menekan dan menjajah. Arus perkembangan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan, tak mampu mengelakkan dirinya dari faham itu. Masa depan yang modern tak mungkin tercipta tanpa modernisasi. Kemudahan, efisiensi dan efektivitas, manajemen pembangunan yang tertata dan terencana, rasionalitas yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebebasan yang universal, merupakan serangkaian adagium yang menjanjikan. Pemikiran Barat meyakini bahwa dengan semua itu, surga dunia akan tercipta.

Fakta sejarah di atas seharusnya mempunyai makna bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Paling tidak, fakta sejarah tersebut memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk tidak mereduksi kelompok intelektual terpelajar secara eksklusif tanpa berpijak pada bumi tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Di sinilah pentingnya, ketika masyarakat bersepakat bahwa pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan sebuah bangsa, harus mampu menyentuh persoalan yang substansial dan fundamental yang berkembang di masyarakat daerah itu, maka diperlukan wacana kritis (kultural) yang menarik keterlibatan kaum terpelajar untuk menyumbangkan pemikiran kritisnya.

Persoalan ini semakin penting dan mendesak jika dicermati bahwa modernisme yang dipilih sebagai landasan pembangunan nasional, ternyata memunculkan kolonialisme baru dari Barat. Dominasi Barat yang merambah sekecil apapun ruang publik di negeri ini, merupakan bentuk penjajahan terhadap tradisi dan pemikiran lokal. Belum lagi ekses yang ditimbulkan dari modernisasi tersebut mengancam peradaban masa depan. Apalagi di tempat asalnya, muncul kesadaran bahwa modernisme ternyata lebih banyak menghancurkan dari pada membangun peradaban. Mengagung-agungkan rasio ternyata telah menerjang batas-batas keyakinan, kepercayaan, keimanan, dan agama. Kebebasan mengeksplorasi alam demi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan umat manusia, ternyata malah merusak keseimbangan alam itu sendiri. Perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagai agen modernisasi, ternyata mengakibatkan dehumanisasi.

Itulah fakta sejarah yang merekam keterlibatan kelompok masyarakat terpelajar bagi perubahan masyarakat Indonesia. Makna dan hakekat sejarah di atas dapat menjadi landasan tentang pentingnya pemikiran (lokal) dalam kebijakan pembangunan daerah. Dewasa ini terdapat kecenderungan eksklusivitas kelompok terpelajar dalam ranah akademis tanpa menyadari bahwa mereka dalam sepanjang sejarah bangsa Indonesia menjadi komponen utama bagi terbangunnya bangsa ke depan.

Hakekat pembangunan di daerah sesungguhnya merupakan upaya berkelanjutan untuk merubah kondisi masyarakat suatu daerah menjadi lebih baik di semua sektor kehidupan. Perubahan yang lebih baik tersebut akan berhasil apabila bertujuan memecahkan persoalan yang berkembang di suatu daerah. Implementasi dari pemikiran tersebut adalah, pembangunan suatu masyarakat bukan semata-mata suatu kebutuhan, tetapi suatu cara yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jika pembangunan hanya dipandang dan berangkat dari kebutuhan suatu masyarakat, maka persoalannya adalah, apakah kebutuhan yang dimaksud benar-benar sebagai solusi bagi permasalahan yang selama ini berkembang di masyarakat itu? Jika tidak, pembangunan di daerah justru akan memunculkan permasalahan yang baru. Oleh karena itulah, keberhasilan pembangunan di daerah akan tercapai apabila mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat tersebut.

Untuk mencapai kebijakan pembangunan semacam itu diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Pemahaman tersebut bukan sekedar mengidentivikasi permasalahan tanpa ditempatkan dalam konteks sosiokultural dan pranata yang mengatur eksistensi masyarakat tersebut. Tak ada persoalan satu pun di suatu masyarakat yang lepas dari konteksnya. Artinya, permasalahan yang timbul di suatu masyarakat selalu bersumber dari fenomena yang berkembang di masyarakat itu. Oleh karena itu, pemahamannya diperlukan cara pandang yang holistik, menyangkut keseluruhan kausalitas yang menyangkut munculnya permasalahan tersebut. Tidak cukup data kuantitatif dari sebuah laporan atau dokumen kelembagaan untuk memahami suatu permasalahan bagi pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Di sinilah peran pemikiran lokal diperlukan untuk memberikan sumbangan pemikirannya dalam rangka pemahaman permasalahan yang berkembang di masyarakat. Pemahaman permasalahan secara holistik membutuhkan kompetensi

yang khusus dan kajian yang rasional. Ranah inilah yang seharusnya menjadi wilayah bagi tradisi pemikiran di daerah untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Paling tidak, hasil-hasil pemikiran lokal menjadi referensi untuk pengambilan suatu kebijakan pembangunan yang efektif.

Sayangnya, referensi pengambilan kebijakan pembangunan daerah belum mengikutsertakan hasil-hasil pemikiran lokal. Ada dua alasan mengapa hal tersebut terjadi. *Pertama*, kurangnya kemauan para intelektual lokal untuk turut melibatkan secara profesional bagi pembangunan di daerah. Kesibukan mereka lebih berfokus pada pengembangan keilmuan secara *an sich* tanpa mengimplementasikan keilmuan itu secara praktis. *Kedua*, kurangnya fasilitas dan kesempatan yang diberikan pemerintah daerah bagi munculnya pemikiran para intelektual lokal untuk turut serta terlibat terhadap pembangunan daerah. Kedua hal tersebut dapat terpecahkan dengan membangun tradisi wacana kritis pemikiran lokal.

Setidaknya fakta historis dan rasionalisasi terhadap makna hakekat pembangunan daerah di atas dapat menjadi landasan berpikir tentang pentingnya keterlibatan aktif pemikiran lokal dalam pembangunan daerah. Pemikiran secara dialektis, sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini, mensintesis dua komponen dalam pengambilan kebijakan pembangunan secara horisontal. Untuk ke arah itu diperlukan mediasi yang menjembatani komunikasi horisontal itu, yaitu terbangunnya tradisi wacana kritis pemikiran lokal.

Wacana kritis pemikiran lokal yang dimaksud adalah hasil-hasil pemikiran para intelektual, akademisi, praktisi, dan pengamat yang berasal dari daerah, yang berusaha mengangkat persoalan-persoalan lokal berdasarkan sudut pandang dan kompetensinya. Pentingnya tradisi wacana kritis intelektual lokal itu terletak pada realitas pembangunan daerah selama ini, belum berangkat dari referensi yang menyeluruh dari semua komponen yang ada di daerah itu. Salah satunya adalah, peranan pemikiran lokal yang ada di daerah itu sebagai komponen penting bagi perubahan masyarakat. Dengan mengambil asumsi historis dan rasional di atas, tradisi wacana pemikiran lokal akan menjadi media partisipasi kelompok masyarakat terpelajar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Di belahan bumi mana pun, wacana kritis selalau memberikan warna bagi terbentuknya kesadaran dan kehidupan masyarakat modern. Secara kultural, wacana kritis merupakan suatu narasi besar yang dibangun berdasarkan produk-

produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Ranah produk budaya selama sejarah bangsa ini ada, selalu dibangun dari kelompok intelektual terpelajar. Semenjak sistem kerajaan di Indonesia pada masa silam hingga saat ini, penanaman ideologi, baik demi kepentingan kelanggengan kekuasaan maupun semata-mata membangun kemasyuran peradaban (?), selalu menempatkan wacana intelektual sebagai medianya.

Ujung pemikiran ini menyiratkan suatu makna bahwa wacana kritis yang dibangun atas dasar pemikiran-pemikiran intelektual menjadi acuan utama untuk mengarahkan bentuk-bentuk kehidupan dan kesadaran masyarakat. Kalau saat ini muncul suatu pemikiran baru tentang pentingnya perspektif kedaerahan sebagai hal pertama dan utama dalam perubahan masyarakat ke depan melalui pembangunan daerah, maka sudah saatnya wacana kritis pemikiran lokal harus dibangun. Kedua makna tersirat yang kita tangkap tersebut dapat diimplementasikan jika, paling tidak, ada empat prasyarat mesti dipenuhi. *Pertama*, diperlukan keterlibatan para intelektual lokal secara serius dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan fungsi dan kompetensinya. *Kedua*, dimanfaatkannya semua fasilitas yang ada bagi terbangunnya wacana kritis pemikiran lokal sebagai kontribusi terhadap kebijakan pembangunan daerah. *Ketiga*, perlunya referensi kritis dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah. *Keempat*, adanya sikap dan pandangan yang positif terhadap pentingnya sumbangan pemikiran yang bersumber dan berpijak pada persoalan kedaerahan bagi pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Mediasi apakah yang mampu menjembatani komunikasi horisontal antara pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dengan kelompok pemikiran lokal sebagai kontributornya? Lebih konkritnya adalah, faktor-faktor apakah yang mampu mewujudkan tradisi wacana kritis pemikiran lokal sebagai media komunikasi horisontal tersebut?

Pertama, media massa dapat menjadi pendorong bagi terbangunnya tradisi wacana kritis pemikiran lokal tersebut. Peranan media massa di era globalisasi menjadi semakin penting dalam membentuk opini publik. Majalah, koran, TV, HP, CD/DVD, dan internet, merupakan produk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tak mungkin dielakkan dampak yang ditimbulkannya. Secara instrumental, itu semuanya hanyalah alat yang diciptakan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk memudahkan dan mengefektifkan pola hidup yang serba kompleks ini. Tapi persoalannya menjadi lain apabila kita merambah pada persoalan akses yang ditimbulkan terhadap kesadaran dan bentuk

kehidupan yang dipolakan oleh hasil-hasil teknologi itu. Tanpa adanya sikap adaptatif dan ditempatkan dalam policy kebudayaan nasional (dan daerah), produk-produk budaya massa menjadi ancaman bagi peradaban masyarakat. Di sinilah letak pijakan yang bisa diambil untuk menempatkan media massa sebagai mediasi komunikasi horisontal yang dimaksud di atas dan sarana membangun tradisi wacana kritis pemikiran lokal. Lebih dari itu, menempatkan media massa dalam peranannya seperti itu menjadi bagian dari upaya untuk mengantisipasi kecenderungan negatif dari produk teknologi modern tersebut.

Kedua, forum-forum ilmiah dan kajian kedarahan dapat juga menjadi mediasi yang efektif dalam membangun tradisi wacana kritis pemikiran lokal tersebut. Forum dan lembaga serupa yang selama ini ada di daerah memiliki kecenderungan yang eksklusif akademis. Sementara di tataran masyarakat, forum dan lembaga tersebut tak mampu mempertahankan eksistensinya karena kompleksnya persoalan yang dialami; bahkan tidak jarang sarat dengan muatan kepentingan politis. Namun demikian, kunci bagi keberlangsungannya terletak pada keterbukaan dan sikap positif dari semua pihak dalam konteks budaya partisipasi bagi pembangunan daerah.

Ketiga, referensi kritis sebagai acuan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Referensi kritis dalam konteks ini adalah, hasil-hasil studi dan analisis kritis terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat dan pemecahannya sebagai rekomendasi bagi dirumuskannya kebijakan pembangunan daerah. Paradigma pembangunan (daerah) yang selama ini menempatkan masyarakat sebagai obyek haruslah berubah. Masyarakatlah merupakan subyek bagi pembangunan. Pemikiran ke arah itu sesungguhnya telah berkembang, tetapi perwujudannya masih terbatas pada wacana. Implementasinya masih sama dengan yang selama ini berlangsung. Menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan akan dapat diwujudkan apabila pembangunan tersebut bersumber dari permasalahan yang ada di masyarakat itu secara kasuistik. Pemahaman dan studi secara kritis, analisis, dan berorientasi pada *applied research* mutlak diperlukan.

Banyak hal sebenarnya yang dapat digunakan dalam membangun tradisi wacana kritis pemikiran lokal. Tiga hal yang dikemukakan di atas merupakan alternatif ke arah itu. Efektivitas ketiganya dalam membangun tradisi semacam itu membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam sebuah jaringan dan sikap positif dan terbuka untuk menerimanya.

Inilah sekelumit pemikiran awal sebagai bahan diskusi dalam rangka membangun tradisi wacana kritis bagi pembangunan daerah. Muara pemikiran ini diharapkan terjadi ke dalam sikap dan pandangan yang positif pentingnya keterlibatan semua komponen daerah bagi perubahan masyarakat ke depan. Sinyalemen para ahli tentang ancaman globalisasi, kolonialisme baru, dan indikator terjadinya gegar budaya di Indonesia, bisa disikapi secara kritis dan rasional. Membiarkan permasalahan yang muncul tanpa berupaya memperbaiki dan memecahkannya, merupakan kesalahan yang tak termaafkan.

Tema utama yang menarik perhatian untuk didiskusikan dalam kerangka membangun wacana kritis di daerah dewasa ini adalah, *pertama*, membangun paradigma kedaerahan sebagai landasan pembangunan nasional (juga daerah). *Kedua*, narasi globalisasi ternyata merupakan intensitas dari bentuk kolonialisme Barat terhadap negara-negara berkembang yang harus diwaspadai dan disikapi. *Ketiga*, budaya pop harus diwaspadai dan diadaptasi secara bijak agar tidak menimbulkan permasalahan ke depan (simak kasus Prita dan Luna Maya sebagai dampak kurang bijaknya menyikapi dan mengadaptasi budaya pop; termasuk di dalamnya Undang-Undang ITE).

BIODATA

1. Nama : Suhariyadi, Drs.
2. Pekerjaan : Staf Pengajar Unirow Tuban
3. Alamat Kerja : Jl. Manunggal, Tuban
4. Alamat Rumah : Perumahan Gedongombo Permai Blok E-25,
Kel. Gedongombo, RT 06 / RW 07,
Kec. Semanding, Tuban, Jawa Timur

